

Analisis Dampak Gaya Komunikasi Juru Bicara KPK Terhadap Persepsi Publik

Sigit Pramono Hadi

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi

Jl. Wijaya II No. 62, Jakarta 12160

sigitvt35@gmail.com

Diterima: Maret, 2020, **Direview:** April, 2020, **Diterbitkan:** Juni, 2020

Abstrak. Sejak didirikan tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pusat perhatian publik dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam bidang penindakan KPK sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pelaku korupsi yang dilanjutkan dengan konferensi pers dengan tujuan menjelaskan duduk perkara tindakan korupsi yang disangkakan kepada pelaku. Dalam konferensi pers tersebut terlihat peran menonjol juru bicara (jubir) KPK sebagai perwakilan resmi lembaga tersebut. Demikian pula dalam berbagai kesempatan, jubir berbicara mewakili KPK untuk menjelaskan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak gaya komunikasi jubir KPK terhadap persepsi publik dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara variabel independen (X) yaitu Gaya Komunikasi dengan variabel dependen (Y) yaitu Persepsi Publik. Responden dipilih menggunakan teknik *sampling* non probabilitas yaitu *accidental sampling*. Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa bahwa gaya komunikasi jubir KPK berdampak positif terhadap persepsi publik dan dampak positif ini memiliki kekuatan pengaruh sebesar 15%. Dengan demikian diperoleh pemahaman bahwa persepsi publik tentang pemberantasan korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh gaya komunikasi jubir KPK sebesar 15%. Sedangkan sebagian 85% lainnya ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam kajian penelitian ini.

Kata kunci: gaya komunikasi, persepsi, pengaruh, korupsi

Abstract. Since its establishment in 2002, the Indonesian Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK) has become the center of public attention in the context of combating corruption in Indonesia. In the area of KPK's legal action, they often carry out arrest operations against the perpetrators of corruption, which are followed by a press conference with the aim of explaining the cases of corruption that are allegedly committed to the perpetrators. At the press conference the prominent role of the KPK spokesman was seen as the official representative of the institution. Likewise on various occasions, the Spokesman spoke on behalf of the KPK to explain the corruption cases handled by the KPK. This study aims to measure the impact of the KPK spokesman's communication style on public perception in the context of eradicating corruption in Indonesia. By using a quantitative approach, this study aims to find out how the causality relationship between the independent variable (X) is the Communication Style with the dependent variable (Y), namely Public Perception. Respondents were selected using a non-probability sampling technique, namely accidental sampling. From the results of the study, it was found that the communication style of the KPK Spokesman had a positive impact on public perception and this positive impact had an influence strength of 15%. Thus an understanding that public perception about eradicating corruption in Indonesia is influenced by the communication style of the KPK spokesman by 15%. While the other 85% is determined by other variables not included in this study.

Keywords: communication style, perception, influence, corruption.

1. Pendahuluan

Hingga menginjak usia 75 tahun kemerdekaan, negara Indonesia masih mengalami kasus-kasus korupsi yang sangat merugikan kepentingan rakyat. Kasus-kasus korupsi di negeri ini berlangsung masif baik di bidang infrastruktur, energi, olahraga, birokrasi, penegakan hukum hingga pelayanan masyarakat. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2018 lalu berada pada skor 38 (skala 0-100) dan menempatkan Indonesia di peringkat 4 Asean, atau peringkat 89 dari 180 negara dunia (Transparency International, 2019). Indeks ini menunjukkan tingkat korupsi di sebuah negara. Skor IPK yang mendekati angka 100 mengindikasikan bahwa sebuah negara semakin bersih dari budaya korupsi. Bandingkan dengan Singapura yang merupakan negara paling bebas dari korupsi di Asia Tenggara dengan skor IPK 85 diikuti Brunei Darussalam (skor IPK 63) dan Malaysia (skor IPK 47). Di urutan paling bawah adalah Kamboja dengan skor IPK 20.

Penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia dikerjakan oleh lembaga penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak disahkan dengan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian KPK tercatat sebagai lembaga yang makin kuat eksistensinya. Keberadaannya yang sejatinya bersifat sementara (*ad hoc*) karena membantu tugas-tugas lembaga kepolisian dan kejaksaan, ternyata kemudian terlihat menjadi lembaga yang lebih andal dalam memberantas korupsi

dibanding lembaga-lembaga tersebut di atas. Eksistensinya makin kuat karena kiprahnya yang luar biasa dalam memberantas korupsi. Terlebih, karena korupsi sendiri merupakan tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Lembaga KPK memiliki struktur kepemimpinan yang terdiri atas lima orang yakni seorang ketua (merangkap anggota) dan empat orang wakil ketua (merangkap anggota). Saat ini pimpinan KPK terdiri atas Firli Bahuri sebagai Ketua KPK didampingi empat komisioner lainnya yaitu Alexander Marwata, Nurul Gufon, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.

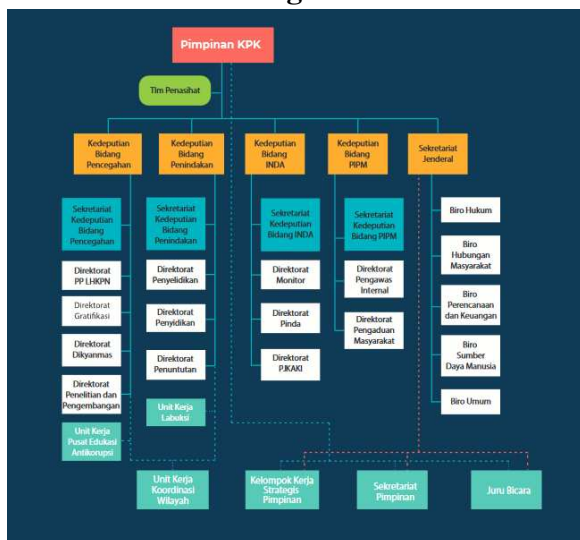
Publik sangat mengapresiasi kiprah KPK karena berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) para koruptor di berbagai daerah. Gebrakan OTT ini merupakan tindakan hukum yang sah dan sekaligus merupakan psikoterapi bagi para pelaku korupsi di seluruh Indonesia. Dari Laporan Tahunan 2018 KPK, lembaga anti rasuah ini tercatat melakukan 30 OTT dengan total 121 tersangka. Para pihak yang terkena OTT ini beragam mulai dari pejabat daerah, Kepala Daerah, politisi anggota DPR, Ketua DPR, jaksa, hakim, Menteri, anggota BPK hingga Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK).

Setiap KPK melakukan OTT dan menetapkan para tersangka (baik pemberi suap maupun penerima suap, penyeleweng kewenangan, penerima gratifikasi, dll) kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyidikan secara pro justisia sehingga KPK memiliki bukti hukum yang kuat untuk memproses penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Untuk menjamin transparansi proses hukum yang berlangsung, seluruh

proses ini diberitakan kepada publik lewat media. Biasanya KPK menyelenggarakan konferensi pers.

Di dalam lembaga KPK terdapat Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang bertugas untuk menyampaikan seluruh informasi internal KPK kepada publik. Namun yang lebih sering diberi kewenangan untuk menyampaikan informasi ke publik adalah Juru Bicara KPK, terutama untuk informasi yang menyita perhatian publik seperti proses OTT. Sedangkan Humas lebih berperan dalam penyampaian informasi secara umum misalnya seperti penyelenggaraan acara yang berkaitan dengan kampanye anti korupsi. Baik Biro Humas maupun Juru Bicara KPK berada di bawah kendali Sekretariat Jenderal KPK. Gambaran posisi Humas dan Juru Bicara KPK ini terlihat dalam bagan berikut ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi KPK



Sumber: Laporan Tahunan KPK 2018

Saat ini posisi Juru Bicara KPK dijabat oleh pelaksana tugas yang terdiri dari 2 orang yaitu Ipi Maryati yang bertugas di

bidang pencegahan dan Ali Fikri di bidang penindakan. Ali Fikri yang sering tampil di layar TV memiliki gaya bicara yang santun meskipun informasi yang disampaikan adalah isu “panas” seputar OTT pelaku korupsi. Gaya bicaranya yang santun, terstruktur, sistematis namun tegas dan tidak emosional bisa menghadirkan suasana sejuk dan menetralsir berbagai kontroversi seputar KPK. Sebagai rujukan resmi informasi tentang KPK, posisinya menjadi pusat perhatian publik.

Berdasar paparan situasi lembaga KPK dan kiprah Juru Bicara KPK di atas, maka merupakan hal menarik untuk dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut. Identifikasi masalah penelitian ini adalah seberapa kuat dampak gaya komunikasi Juru Bicara KPK terhadap persepsi publik tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat dampak gaya komunikasi Juru Bicara KPK terhadap persepsi publik tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Tinjauan Literatur

Menurut Klitgaard (2005), korupsi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang seharusnya. Perbuatan korupsi diawali ketika seseorang secara sengaja mengesampingkan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadinya serta nilai-nilai yang menurut sumpah akan dijalkannya. Maka korupsi tidak hanya menyangkut persoalan serius, bahkan persoalan sepele pun bisa dikategorikan sebagai korupsi. Contoh perbuatan korupsi misalnya adalah penyalahgunaan instrumen kebijakan pemerintah (contohnya antara lain

pelaksanaan kontrak kerjasama, pengadaan peralatan, atau pembangunan infrastruktur) atau yang berkaitan dengan prosedur-prosedur administrasi sederhana. Tindakan korupsi dapat terjadi di mana saja baik di kalangan pemerintahan maupun swasta, bahkan seringkali terjadi di keduanya. Sepanjang tersedia kesempatan untuk melakukannya, maka korupsi dapat terjadi dimana saja.

Masih menurut Klitgaard (2005), korupsi dapat terkait dengan ancaman, janji atau keduanya; dapat dilakukan oleh seorang aparat pegawai negeri sipil (PNS) atau pihak lain yang berkepentingan; dapat mencakup tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang, pemberian komisi, penghilangan jejak, dapat menggunakan jasa yang sesuai aturan maupun tidak, dan dapat terjadi di internal maupun eksternal organisasi pemerintah. Karena luasnya cakupan tersebut maka tindakan korupsi sulit untuk didefinisikan dengan jelas dan dipengaruhi oleh tradisi maupun peraturan perundangan setempat.

Menurut Baswir (2002), tindakan korupsi dapat dijelaskan dengan beberapa sudut pandang yang berbeda. Meski demikian, para ahli sepakat bahwa korupsi mengandung dua ciri berikut ini di dalamnya, yaitu: *Pertama*, penyalahgunaan wewenang yang menyimpang dari ketentuan hukum oleh pejabat negara; dan *Kedua*, pejabat negara meletakkan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan masyarakat luas yang dilayaninya.

Masih menurut Baswir (2002), sejarah perkembangan korupsi di Indonesia memberikan pemahaman: *Pertama*, korupsi pada dasarnya berkaitan dengan perilaku

kekuasaan. Mengutip Lord Acton, kekuasaan memang cenderung untuk korup (*power tends to corrupt*). Berdasar pemahaman ini maka kekuasaan yang berkuasa secara absolut, akan korup secara absolut pula. *Kedua*, korupsi sangat erat kaitannya dengan perkembangan sikap kritis masyarakat. Semakin berkembang sikap kritis masyarakat, atau dengan kata lain semakin sadar masyarakat, maka korupsi akan cenderung dipandang sebagai fenomena yang semakin meluas.

Pengertian Gaya Komunikasi

Kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari komunikasi. Tujuan manusia melakukan komunikasi adalah untuk saling membagikan pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia adalah bahasa sinyal, bicara, tulis, gerak dan penyiaran.

Salah satu fokus kajian dalam penelitian ini adalah gaya komunikasi, maka dalam penelitian ini perlu ada pembahasan tentang gaya komunikasi. Berbagai praktik perilaku komunikasi menjelaskan bahwa gaya komunikasi sangat berperan dalam memperlancar proses komunikasi dan membangun hubungan yang baik antar pihak. Bahkan gaya komunikasi sering menentukan berhasil tidaknya sebuah proses komunikasi.

Wijaya (dalam Fajrie, 2016), mendefinisikan gaya komunikasi (*communication style*) dari sudut pandang tindakan yaitu sebagai seperangkat perilaku antar individu yang dipergunakan dalam sebuah situasi tertentu. Gaya komunikasi merupakan cara menyampaikan pesan sesuai dengan situasi. Gaya tersebut dapat berbentuk verbal (yaitu terdiri dari kata-kata)

maupun non verbal (yaitu bisa berupa vokal, gestur, waktu, ruang dan jarak).

Gaya komunikasi adalah tindakan berkomunikasi yang dipergunakan untuk memperoleh tanggapan tertentu dalam situasi tertentu pula. Sesuai tidaknya penggunaan sebuah gaya komunikasi yang dipakai tergantung dari maksud komunikator dan harapan komunikan. Menurut Fajrie (2016), penggunaan gaya komunikasi dipengaruhi situasi. Setiap individu akan memilih gaya komunikasi yang berbeda tergantung pada situasi yang sedang dialaminya misalnya sedang sedih, bergembira, marah, bosan atau antusias. Hal yang sama juga terjadi tatkala individu berbicara dengan pihak lain yang berbeda-beda tingkat keeratan hubungannya. Semakin rendah keeratan hubungannya maka gaya komunikasi yang dipergunakan cenderung semakin formal.

Martin dan Nakayama (dalam Lubis, 2015) memaparkan sedikitnya terdapat 3 dimensi yang terkait dengan gaya komunikasi yaitu: konteks tinggi atau rendah, konteks langsung atau tidak langsung dan konteks menguraikan atau mempersingkat. Salah satu penjelasannya, menurut Hall (dalam Lubis, 2015), komunikasi konteks tinggi adalah komunikasi dimana sebagian besar informasi berupa konteks fisik atau terkait dalam diri seseorang, sedikit menggunakan kode dan pesan yang disampaikan, bersifat implisit sehingga gaya komunikasinya memberi tekanan pada pemahaman pesan tanpa komunikasi verbal secara langsung. Komunikasi konteks rendah adalah sebaliknya yaitu sebagian besar makna dan informasi disampaikan secara eksplisit sehingga gaya komunikasinya memberi penekanan pada pesan verbal yang

eksplisit. Menurut orang-orang yang sering menggunakan gaya komunikasi ini, nampaknya lebih baik dipergunakan yang eksplisit dan berbicara langsung kepada intinya serta tidak menimbulkan ambigu (multimakna).

Menurut Tubbs & Moss (dalam Limantoro, 2015) terdapat 6 gaya komunikasi yang selama ini dijadikan rujukan. Pertama, *the controlling style*. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan yang dicirikan adanya niat untuk mengatur, memaksa, atau membatasi orang lain. Dari sudut pandang arus pesan, gaya komunikasi ini disebut sebagai komunikasi satu arah dimana pihak-pihak yang memanfaatkannya lebih fokus pada sisi pengiriman pesan. Dalam hal ini, komunikator cenderung mengabaikan aspek penerimaan, sehingga pembahasan tentang komunikan dianggap tidak penting. Kedua, *the equalitarian style*. Pada gaya komunikasi ini ada pemahaman kesetaraan antar pihak yang dicirikan dengan berlangsungnya penyampaian pesan yang bersifat dua arah (*two-way traffic of communication*). Gaya komunikasi ini lebih mengalir dimana para pihak lebih informal, rileks dan santai. Gaya komunikasi ini lebih memungkinkan berlangsungnya saling berbagi informasi (*share of information*) di antara para pihak yang berkomunikasi. Ketiga, *the structuring style*. Penggunaan gaya komunikasi ini yaitu dengan memanfaatkan pesan-pesan secara lisan maupun tertulis guna memastikan perintah yang harus dijalankan, pengaturan jadwal, bentuk tugas atau pekerjaan dalam sebuah internal organisasi. Pengirim pesan (*sender*) fokus pada tujuan untuk memengaruhi pihak lain dengan cara menyampaikan berbagai informasi penting

organisasi yaitu tujuan, misi, struktur, aturan, jadwal, sistem dan prosedur yang ada. Keempat, *the dynamic style*. Jenis gaya komunikasi ini cenderung agresif karena pengirim pesan (*sender*) paham bahwa lingkungannya lebih mementingkan tindakan yang cepat (*action-oriented*). Dalam praktiknya gaya komunikasi jenis ini paling sering dipergunakan dalam bidang politik (oleh para juru kampanye) atau dalam bidang bisnis (oleh para *supervisor* yang membawa para wiraniaga). Kelima, *the relinquishing style*. Ini adalah gaya komunikasi yang lebih menggambarkan kesediaan untuk menerima gagasan, pendapat, atau saran orang lain meskipun pengirim pesan memiliki wewenang untuk memberi kontrol dan memerintah orang lain. Namun demikian, efektivitas pesan dalam gaya komunikasi ini adalah jika pengirim pesan sedang berinteraksi dengan pihak lain yang berpendidikan, berpengetahuan luas, teliti, berpengalaman dan aktif serta bersedia menjalankan semua tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Keenam, *the withdrawal style*. Gaya komunikasi ini bernuansa negatif. Efek yang muncul dari gaya komunikasi ini adalah mengendurnya kegiatan komunikasi, artinya orang-orang yang berkomunikasi dengan gaya ini makin malas untuk berkomunikasi satu dengan yang lain (*lazy to communicate*). Hal tersebut bisa dikarenakan adanya masalah atau kesulitan yang sifatnya pribadi dalam diri masing-masing orang tersebut. Dengan demikian maka proses komunikasi akan tersendat dan bahkan kemudian terhenti.

Sesuai dengan yang diungkap dalam latar belakang penelitian ini dimana Juru Bicara (Jubir) KPK menggunakan gaya

komunikasi santun, terstruktur, sistematis namun tegas dan tidak emosional, maka dalam penelitian ini hanya dikaji gaya komunikasi yang ciri-cirinya sama yaitu *the structuring style*.

Menurut Dianengaseh (2014), ada tujuh hal yang bisa menjelaskan tentang dinamika interaksi antar anggota organisasi, dimana di dalamnya terdapat gaya dalam berkomunikasi. Dengan demikian maka faktor-faktor inilah yang mempengaruhi gaya-gaya komunikasi, yaitu: a) *Kondisi fisik*. Dalam praktiknya, kondisi fisik pada saat melakukan komunikasi jelas sangat mempengaruhi gaya komunikasi yang dilakukan. Misalnya ketika kegiatan komunikasi dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung, maka tentu akan berdampak pada ketidaknyamanan dan rendahnya pemahaman pesan antar pihak yang berkomunikasi. Dengan demikian dimungkinkan terjadi salah mengerti pesan yang disampaikan. b) *Peran*. Pemahaman tentang peran diri sendiri dan pihak lainnya akan menentukan bagaimana pilihan rencana untuk berinteraksi. Pemahaman ini memunculkan keinginan yang berbeda-beda sehingga memberikan rangsangan untuk saling berkomunikasi. c) *Konteks Historis*. Sejarah akan menentukan bagaimana memosisikan diri kita saat akan berinteraksi dengan orang lain, sehingga dengan demikian dapat menentukan gaya komunikasi yang mana yang akan dipilih untuk digunakan. Pemahaman yang sama atas sebuah kisah sejarah tentu akan memperlancar proses komunikasi yang sedang dibangun. d) *Kronologi*. Urutan serangkaian peristiwa interaksi dapat mempengaruhi pilihan gaya komunikasi seseorang. Jika interaksi di masa

lalu berlangsung nyaman atau justru sebaliknya tidak nyaman, maka hal ini akan menjadi pembeda dalam pilihan gaya komunikasi yang akan dipergunakan. e) *Bahasa*. Dalam konteks ini, yang dilihat adalah faktor bahasa yang digunakan dan kelancaran kita menggunakannya. Semuanya berperan dalam gaya komunikasi seseorang. Contohnya jika seseorang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu, maka jika proses komunikasi dilakukan dalam bahasa Inggris tentu dia akan lebih lancar dibanding orang asing, sehingga akan menimbulkan gaya komunikasi yang berbeda. Demikian pula jika yang dipergunakan adalah bahasa dengan logat tertentu, maka pihak pengirim dan penerima akan terlibat dalam komunikasi yang lancar jika menguasai logat yang sama. f) *Hubungan*. Yang dimaksud hubungan adalah seberapa dekat kita memahami orang lain dan seberapa percaya kita terhadap seseorang dan sebaliknya. Situasi ini tentu saja akan mempengaruhi bagaimana kita akan menjalin komunikasi dengan orang lain. Disamping itu, dinamika hubungan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu akan berdampak pada interaksi selanjutnya yang akan dibangun. g) *Kendala*. Kendala bisa berupa kendala teknis (misalnya terkait teknologi yang menyebabkan seseorang terganggu saat berkomunikasi), kendala waktu (perbedaan kebiasaan yang menyebabkan tidak cocoknya momentum berkomunikasi), atau kendala lainnya yang mempengaruhi niat, suasana dan kenyamanan komunikator maupun komunikan saat saling berkomunikasi satu sama lain.

Persepsi

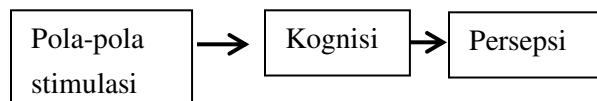
Berbagai literatur menjelaskan bahwa persepsi (dari bahasa Latin *perceptio*, *percipio*) adalah tindakan mengenali, menyusun dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Pengertian persepsi berkaitan dengan tanda dan sistem saraf manusia, dimana tanda ini merupakan hasil dari respon organ pengindra karena terstimulasi secara fisik atau kimia. Persepsi muncul karena adanya stimulan dari lingkungan, kemudian diolah secara kognitif dengan menggunakan daya nalar yang dimiliki, lalu menyusun serangkaian penilaian terhadap apa yang direpson (dilihat atau dirasakan) serta kemudian berproses pikir untuk mengambil keputusan apa yang akan dilakukan.

William Ittelson (dalam Afifah Harisah, 2008) mendefinisikan persepsi sebagai bagian dari proses kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang, dari pandangan orang pada titik tertentu, lalu orang tersebut mengkreasikan hal yang dipandanginya tersebut untuk dunianya sendiri, dan kemudian orang tersebut mencoba mengambil keputusan untuk memenuhi kepuasannya pribadi.

Proses terjadinya persepsi dibedakan berdasar beberapa sudut pandang. Salah satunya adalah *Teori Ecological Perception* yang dikemukakan oleh Gibson (dalam Afifah Harisah, 2008) yang menekankan perlunya pendekatan persepsi secara menyeluruh dan terarah sehingga pola-pola stimulasi (dalam hal ini bisa berupa tanda, simbol atau lainnya) memberikan *the perceiver* (orang yang merasakannya, melihatnya) informasi sesegera mungkin

mengenai suatu lingkungan termasuk karakter dari obyek atau tempat melalui sedikit usaha atau aktivitas yang kognitif. Selanjutnya bila diurutkan dapat digambarkan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2
Proses Terjadinya Persepsi Menurut Teori
Ecological Perception



Sumber: Harisah (2008)

Menurut Walgito (1990) dimensi yang menyusun konsep persepsi ada tiga macam. Pertama, *penyerapan* terhadap rangsangan atau objek dari luar individu. Rangsangan atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut maka otak akan mendapatkan gambaran, tanggapan atau kesan. Gambaran tersebut dapat bersifat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsangan, normalitas alat indera dan waktu, yaitu baru saja terjadi atau sudah lama. Dalam penelitian ini, penyerapan yang dipergunakan untuk menjadi landasan kajian adalah pengamatan oleh indera penglihat. Kedua, *pengertian* atau pemahaman yaitu: setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran

tersebut kemudian diorganisir, dikelompokkan, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, dan kemudian diinterpretasi sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman sangat unik dan cepat dimana pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah lama dimiliki individu tersebut sebelumnya (disebut sebagai *apersepsi*). Ketiga, *penilaian* atau evaluasi yaitu setelah terbentuk pengertian atau pemahaman kemudian terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperolehnya tersebut dengan kriteria atau norma yang dimilikinya secara subjektif. Dalam konteks ini maka bisa dipahami bahwa penilaian oleh tiap individu akan memberikan hasil yang berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi selalu bersifat individual (*personal*).

3. Metode Penelitian

Paradigma penelitian ini adalah positivistik karena didalamnya terdapat pola hubungan sebab akibat antar variabel yang akan diteliti. Hal tersebut terkait dengan Dampak Gaya Komunikasi Juru Bicara KPK Terhadap Persepsi Publik khususnya dalam Kajian tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan demikian maka data-data yang dianalisis merupakan data-data yang formatnya adalah numerik (Kriyantono, 2009). Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, maka peneliti akan meneliti seberapa besar dampak gaya

komunikasi Juru Bicara KPK terhadap persepsi publik khususnya dalam kajian tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Metode penelitian ini adalah survei. Metode ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Dengan menggunakan metode ini maka peneliti mengambil jarak terhadap subjek penelitian sehingga dengan demikian data yang diperoleh adalah murni merupakan pendapat subjek tanpa campur tangan dari peneliti.

Penelitian ini bersifat eksplanatif. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan untuk mempelajari hubungan sebab akibat antara dua variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, hubungan sebab akibat ini adalah antara gaya komunikasi Juru Bicara KPK dengan persepsi publik khususnya dalam kajian tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Populasi penelitian ini adalah masyarakat dewasa di Jakarta Selatan. Masyarakat dewasa dipilih sebagai populasi karena sebagai masyarakat umum mereka diasumsikan memberi atensi, kritis dan sering menemukan langsung isu-isu komunikasi maupun persoalan-persoalan koruptif di negeri ini lewat pengalaman kehidupan sehari-hari. Batasan usia dewasa adalah seseorang yang sudah berusia di atas 18 tahun dan tidak memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, status sosial dan parameter demografis lainnya.

Dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah masyarakat dewasa di Jakarta Selatan. Sampel merupakan bagian dari populasi sehingga memiliki karakteristik yang identik dengan populasi. Jadi karakteristik sampel identik dengan karakteristik populasi.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling*. Teknik *sampling* ini adalah metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2011). Secara lebih jelas, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *accidental sampling* yakni teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan sampel yang kebetulan sesuai dengan kriteria dan langsung ditetapkan sebagai sampel (Sugiyono, 2011). Kriteria yang dimaksud adalah bahwa responden harus sudah berusia dewasa (usia > 18 tahun), tahu tentang pemberitaan kasus-kasus korupsi di KPK, dan tahu tentang juru bicara KPK. Pertimbangan teknik *sampling* ini adalah bahwa dengan penetapan kriteria seperti di atas maka menyebabkan jumlah populasinya tidak diketahui.

Untuk mengetahui keterbelahan pendapat publik secara signifikan, peneliti menggunakan skala Likert genap yaitu empat skala sehingga tidak ada peluang responden untuk menjawab 'ragu-ragu'. Pendapat 'Sangat Tidak Setuju' diwakili skala 1, 'Tidak Setuju' diwakili skala 2, 'Setuju' diwakili skala 3, dan 'Sangat Setuju' diwakili skala 4.

Terdapat dua variabel yang digunakan dan dianalisis pada penelitian ini, yaitu variabel bebas (*independent*) Gaya Komunikasi. Variabel ini memiliki dimensi sebagai berikut: Kondisi fisik, Peran, Konteks Historis, Kronologi, Bahasa, Hubungan, dan Kendala. Selanjutnya variabel terikat (*dependent*) yaitu Persepsi Publik. Variabel ini memiliki dimensi

sebagai berikut: Pengamatan, Pemahaman dan Penilaian.

Instrumen penelitian dikembangkan dari operasionalisasi kedua variabel lengkap dengan dimensinya. Dari masing-masing dimensi pada masing-masing variabel kemudian dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang akan menjadi *item* pertanyaan (atau pernyataan) untuk disampaikan ke responden. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh dari gaya komunikasi (variabel independen) terhadap persepsi publik (variabel dependen).

Analisis yang dilakukan adalah analisis bivariat untuk melihat hubungan dua variabel yang dipergunakan. Untuk itu peneliti menggunakan analisis regresi linear yang berguna untuk mencari besaran pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). Dalam perhitungannya peneliti menggunakan rumus regresi linear sederhana untuk melakukan uji bivariat yang berguna untuk mencari adanya dampak variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). Sedangkan untuk mengukur kekuatan dampak (pengaruh) variabel X (gaya komunikasi) terhadap variabel Y (persepsi) dihitung dengan menggunakan nilai koefisien determinasi (R^2).

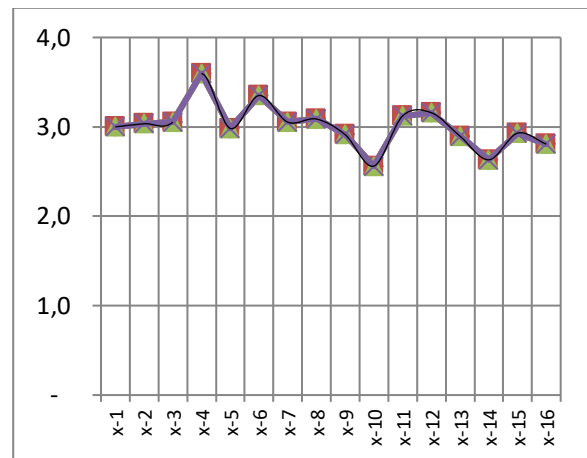
4. Hasil dan Pembahasan

Meskipun penelitian ini bersifat eksplanatif, namun diperlukan gambaran lebih lengkap tentang karakteristik masing-masing variabel, sehingga dengan demikian akan dapat mempertajam penjelasan tentang sebuah variabel yang pada akhirnya mempengaruhi variabel lain.

Untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel, terlebih dahulu

dilakukan analisis terpisah antar variabel. Masing-masing variabel dilihat secara terpisah perolehan rata-rata (*means*) dari seluruh indikator dengan menggunakan garis kontinum sehingga diperoleh gambaran penilaian responden terhadap masing-masing variabel secara lengkap. Berikut ini adalah analisis nilai rata-rata (*means*) indikator variabel “Gaya Komunikasi”:

Grafik 1
Grafik Kontinum Nilai Rata-Rata (*Mean*)
Variabel “Gaya Komunikasi” (X)



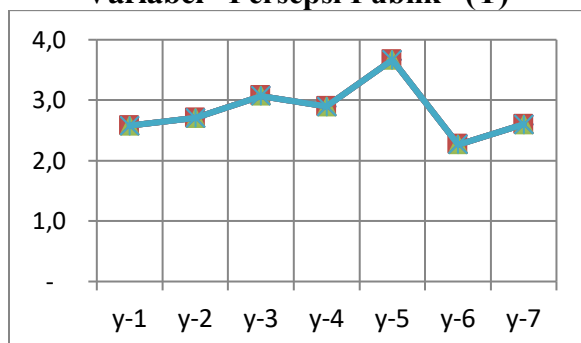
Sumber: Hasil Penelitian

Pada Grafik 1 di atas: Grafik Kontinum Nilai Rata-Rata (*Mean*) Variabel “Gaya Komunikasi” (X) di atas ini terlihat bahwa nilai terendah dengan skor 2,6 berada pada pernyataan (indikator) nomor X-10 yaitu pernyataan “Siapa pun yang menjabat, Jubir KPK selalu berpenampilan mirip satu sama lain” dan nomor X-14 yaitu pernyataan “Sosok Jubir KPK sangat dikenal masyarakat”. Penilaian yang rendah ini menggambarkan ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan di atas. Dengan rata-rata nilai yang rendah ini, responden memiliki pandangan yang sebaliknya. Ini memberikan

makna bahwa setiap Jubir KPK dianggap memiliki penampilan yang berbeda-beda, dan tidak semuanya sangat dikenal masyarakat.

Pada Grafik 1 tersebut juga terlihat bahwa nilai tertinggi dengan skor 3,6 adalah pada pernyataan (indikator) nomor X-4 yaitu pernyataan “Jubir KPK berperan penting dalam menyampaikan informasi dari KPK”. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju bahwa Jubir KPK dianggap memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dari KPK. Pandangan ini sudah sesuai dengan tugas pokok jabatan juru bicara yang memang menjadi perwakilan resmi lembaga KPK untuk menyampaikan segala informasi yang terkait dengan lembaga tersebut kepada masyarakat luas. Dengan demikian, informasi yang diucapkan oleh juru bicara menjadi rujukan resmi untuk seluruh kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK.

Grafik 2
Grafik Kontinum Nilai Rata-Rata (Mean) Variabel “Persepsi Publik” (Y)



Sumber: Hasil Penelitian

Pada Grafik 2 di atas: Grafik Kontinum Nilai Rata-Rata (Mean) Variabel “Persepsi Publik” (Y) terlihat bahwa nilai terendah dengan skor 2,3 berada pada pernyataan (indikator) nomor Y-6 yaitu

pernyataan “Anda yakin semua kasus korupsi akan ditangani KPK”. Hal ini menandakan bahwa responden memiliki pandangan yang sebaliknya yaitu tidak yakin (pesimis) bahwa KPK akan menangani seluruh kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Meski demikian, rasa pesimisme ini dibarengi dengan keyakinan lain. Hal ini terlihat dari nilai tertinggi dengan skor 3,7 pada pernyataan (indikator) nomor Y-5 yaitu pernyataan “Anda menganggap korupsi sebagai tindak kejahatan yang luar biasa”. Hal ini menggambarkan bahwa responden sangat setuju bahwa korupsi memang merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Maka dapat pula dipahami apabila penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Dalam konteks KPK, penanganan luar biasa ini diantaranya adalah ditempatkannya fungsi penyidikan dan penuntutan dalam lembaga yang sama. Dalam struktur ketatanegaraan yang normal, kedua fungsi ini ditempatkan dalam posisi yang terpisah, dan dilakukan oleh lembaga yang berbeda yaitu penyidikan dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sedangkan penuntutan dilakukan oleh lembaga Kejaksaan. Maka dengan bersatunya dua fungsi penting ini, bisa dipahami bahwa KPK memang merupakan sebuah lembaga superbodi yang diharapkan mampu menutupi kekurangharmonisan hubungan kedua fungsi tersebut.

Dengan analisis lebih lanjut, dari Tabel 1 di bawah (Tabel Coefficients) dapat disusun persamaan regresi linear dari kedua variabel ini yaitu persamaan $Y=1,3+0,4X$. Persamaan ini menunjukkan bahwa jika ada setiap perubahan variabel X (Gaya Komunikasi) sebesar 1 poin maka variabel Y

(Persepsi Publik) juga akan berubah sebesar 0,4 poin dengan arah yang sama. Jadi, variabel “Gaya Komunikasi” memiliki pengaruh terhadap variabel “Persepsi Publik” secara positif.

Tabel 1
Tabel Coefficients

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.245	.395		3.151	.003
	GAYAkomunikasi	.402	.130	.384	3.083	.003

a. Dependent Variable: PERSEPSI

Sumber: Hasil Penelitian

Makna pengaruh positif adalah jika skor nilai variabel X (Gaya Komunikasi) bertambah besar maka akan mengakibatkan perubahan skor nilai variabel Y (Persepsi Publik) ke arah yang sama (membesar). Demikian pula sebaliknya jika variabel X (Gaya Komunikasi) bertambah kecil yang akan mengakibatkan perubahan variabel Y (Persepsi Publik) ke arah yang semakin mengecil.

Tabel 2
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.384 ^a	.147	.132	.30269

a. Predictors: (Constant), GAYAkomunikasi

Sumber: Hasil Penelitian

Kemudian analisis berdasarkan Tabel 2 di atas (Tabel Model Summary) dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dari kedua variabel adalah 0,147 atau disederhanakan menjadi 0,15. Nilai koefisien ini memberi gambaran besarnya kekuatan pengaruh antar variabel penelitian. Maka,

nilai koefisien sebesar 0,15 memberi makna bahwa perubahan variabel X (Gaya Komunikasi) mampu menjelaskan perubahan variabel Y (Persepsi Publik) sebesar 15%. Atau dengan kata lain, variabel “Gaya Komunikasi” berpengaruh sebesar 15% terhadap variabel “Persepsi Publik”. Sementara perubahan sisanya yaitu sebesar 85% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai “Analisis Dampak Gaya Komunikasi Juru Bicara KPK Terhadap Persepsi Publik”, maka dari hasil keseluruhan penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, responden sangat setuju Jubir KPK memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dari KPK. Hal ini sesuai dengan tugas pokok jabatan jubir yaitu menjadi wakil resmi lembaga KPK dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. *Kedua*, responden berpandangan bahwa kasus-kasus korupsi adalah merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pemberantasannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan menyatukan fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan dalam satu lembaga yang sama yaitu lembaga KPK. *Ketiga*, dari hasil analisis diperoleh fakta bahwa “Gaya Komunikasi” Jubir KPK berdampak positif terhadap “Persepsi Publik” dan dampak positif ini memiliki kekuatan pengaruh sebesar 15%. Dengan demikian diperoleh pemahaman bahwa persepsi publik tentang pemberantasan korupsi di Indonesia

dipengaruhi oleh gaya komunikasi jubar KPK sebesar 15%. Sementara sisanya yaitu sebesar 85% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

6. Referensi

- Afifah Harisah, Z. M. (2008). Persepsi manusia terhadap tanda, simbol dan spasial. *Jurnal SMARTek*, 6(1), 29 – 43.
- Baswir, R. (2002). Dinamika korupsi di indonesia: dalam perspektif structural. *Jurnal Universitas Paramadina*, 2(1), 25–34.
- Dianengaseh, M. (2014). *Gaya Komunikasi Mahasiswa Keluarga Broken Home : Studi Pada Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fajrie, M. (2016). *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi dan Tradisi Pesisiran*. Penerbit Mangku Bumi.
- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi*. Obor Indonesia.
- Kriyantono, R. (2009). *Teknik praktis Riset Komunikasi*. Kencana.
- Limantoro, F. (2015). Pengaruh Gaya Komunikasi Direktur terhadap Kepuasan Komunikasi Karyawan di PT. Sumarni Mustajab Batu. *Jurnal E-Komunikasi*, 3(2).
- Lubis, O. (2015). Gaya berkomunikasi dan adaptasi budaya mahasiswa Batak di Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, 2(5), 314–329.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Walgito, B. (1990). *Pengantar Psikologi Umum*. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.